

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Perlu diingat bahwa otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi menjadi cita-cita reformasi yang terealisasi pasca Orde Baru. Di lain sisi menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai satuan yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomi daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun, pemerintah pusat tidak dapat memberikan sepenuhnya pembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah diberikan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Peranan pemerintah baik di pusat maupun daerah sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu peran pemerintah daerah ialah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2001) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variable lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Pentingnya variable keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan.

Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai pada tingkat hierarki yang paling rendah dalam hal ini pengelolaan keuangan

daerah diberi wewenang dalam batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggungjawab tertentu dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya (Coralie 1987).

Keberhasilan pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran karena pengukuran kinerja merupakan mata rantai yang kesinambungan dengan proses penganggaran. Kenis (1979) mengatakan salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut.

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi kurang tepat, hal ini akan menyebabk pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979).

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan analisis kinerja keuangan daerah ada beberapa rasio yang bisa digunakan, diantaranya adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan. Dalam rangka pengukuran kualitas dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah, digunakan analisis menggunakan teknik dan langkah yang tepat sehingga hasil analisis yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam pengambilan kebijakan keputusan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Ada beberapa teknik analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, antara lain teknik analisis varians, teknik analisis rasio, teknik analisis pertumbuhan, teknik analisis regresi dan teknik analisis prediksi.

Teknik pertama adalah teknik analisis varians, secara umum teknik ini menguji dua varians (ragam) berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Dalam melakukan analisis rasio keuangan dilakukan perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan.

Menurut Mahmudi teknik analisis rasio keuangan dapat digunakan dalam menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun.

Teknik analisis berikutnya adalah teknik analisis rasio kemandirian, teknik ini paling sering digunakan karena dengan teknik ini pemerintah daerah dapat mengetahui apakah sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengelola dan mengurus program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri atau masih memiliki ketergantungan yang besar kepada bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Halim kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Terkait dengan tujuan pengukuran kinerja maka perlu diketahui data pendapatan dan belanja pada subjek penelitian, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ini adalah data ringkasan APBD sebagai salah satu tolak ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran APBD Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Pendapatan			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	70.000.000	77.712.500	111,02
2020	587.500.000	979.340.000	66,7
2021	1.000.000.000	266.040.000	26,6

Belanja			
Tahun	Target(Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	1.452.552.705.228	1.627.640.993.373	89
2020	1.749.968.623.720	1.686.816.709.357	93
2021	2.848.199.421.867	2.709.738.593.349	95

Sumber: Dinas PK Prov. NTT

Berdasarkan table 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2019 Target pendapatan sebesar Rp70.000.000 dan Realisasi Pendapat sebesar Rp77.712.500. Pada tahun 2020 Target pendapatan sebesar Rp587.500.000 dan Realisasi pendapatan sebesar Rp979.340.000. Pada tahun 2021 Target pendapatan sebesar Rp1.000.000.000 dan Realisasi pendapatan sebesar Rp266.040.000. Pada tahun 2019 Target belanja sebesar Rp1.452.552.705.228 dan Realisasi belanja sebesar Rp1.627.640.993.373. Pada tahun 2020 Target belanja sebesar Rp1.749.968.623.720 dan Realisasi belanja sebesar Rp1.686.816.709.357. Pada tahun 2021 Rp2.848.199.421.867 dan Realisasi belanja Rp2.709.738.593.349.

Dilihat dari tabel pendapatan diatas menunjukkan kinerja pendapatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan pada tahun 2021 dari 166,70% ke 26,60% sedangkan untuk kinerja belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah terlaksana dengan baik. Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang diatas baik data maupun hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Tahun 2019-2021”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019-2021 diukur menggunakan rasio keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019-2021 diukur menggunakan rasio keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk memberi manfaat berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan teori akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah, sekaligus sebagai pemenuhan syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dalam rangka mencapai gelar sarjana

2. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menyempurnakan kinerja keuangan daerah menjadi lebih baik.